

Efektivitas Pengawasan Dan Sertifikasi Benih TPHP Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Perkebunan Pada UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih TPHP Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh

Zulkhaidir Abdullah

Dosen Ilmu Administrasi Bisnis/STIA Iskandar Thani

Cut Hamdiah

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

Rahmah Yulianti

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

zulkhaidira@gmail.com

cuthamdiah@serambimekkah.ac.id

rahmah.yulianti@serambimekkah.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja, Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP dalam rangka meningkatkan Produktivitas Perkebunan pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Objek penelitian ini adalah Kinerja, Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP dalam rangka meningkatkan Produktivitas Perkebunan pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana selalu mengedepankan wawancara, observasi di lapangan yang ada kaitannya dengan Kinerja, Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh dalam rangka meningkatkan Produktivitas Perkebunan. Hasil penelitian ini adalah pihak petani dan pekebun juga masih menilai cukup baik dengan kinerja yang dilakukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP sehingga membuktikan bahwa apa yang diberikan sangat berdampak bagi mereka. Dukungan anggaran UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Panga Hortikultura Perkebunan Distanbun Aceh sangat diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat operasional seperti pengawasan langsung kelapangan sebagai tugas pokok dan pengecekan langsung benih tanaman pangan hortikultura perkebunan terhadap petani dan pekebun. Mengenai Sumber Daya Manusia UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh sudah sesuai tergolong baik dan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal serta anggota yang ditempatkan disitu dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya.

Kata Kunci:

Kinerja; Anggaran; Sumber Daya Manusia;

PENDAHULUAN

Perkebunan merupakan salah satu yang penting dalam struktur perekonomian saat ini, juga sebagai mata rantai dalam dunia usaha yang utama, perkebunan sangat memberi arti yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Penggunaan benih palsu atau asalan diduga sebagai biang

keladi rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat. Kondisi itu terjadi karena kurangnya pengetahuan petani dan mahalnya benih unggul bersertifikat.

Data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyebutkan, saat ini luas perkebunan rakyat mencapai 4,7 juta hektar, terdiri atas 1 juta hamparan petani plasma dan 3,7 juta ha milik petani swadaya. Dari luas itu, petani memproduksi 11 juta ton CPO atau menyumbang 30% terhadap produksi nasional. Menurut Wakil Sekjen Apkasindo Rino Afrino, penggunaan bibit tidak unggul (*illegitim seeds*) oleh petani swadaya itu umumnya dilatarbelakangi ketidaktahuan petani karena tidak adanya pendampingan dari perusahaan.

Bahkan, data terakhir Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, menyebutkan, produktivitas perkebunan sawit rakyat hanya 2 ton CPO per Haper tahun, jauh dibandingkan dengan perkebunan swasta yang berkisar 4-8 ton per Ha per tahun. Rendahnya produktivitas ini akibat petani ingin menanam sawit dengan cepat dan murah, tanpa mempedulikan lagi hasilnya. Padahal, salah memilih bibit, kerugian akan ditanggung untuk waktu yang lama. Selain itu, pada saat yang sama, petani tidak mengelola kebun dengan benar, mulai dari perawatan tanaman, pemupukan, hingga pemanenan. Mereka tidak tahu cara membersihkan gawangan atau memotong pelepah dengan benar. Saat panenpun, petani tidak memiliki pengetahuan apakah buah benar-benar telah matang.

Di Provinsi Aceh, sebagai fakta ada dua perkebunan kelapa sawit yang menjadi permasalahan yaitu yang pertama data yang dirilis Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara bahwa ribuan hektare perkebunan kelapa sawit di Daerah Aceh Utara sudah tidak produktif karena telah berusia diatas 25 tahun dan sebagian tanaman dari bibit tidak bermutu serta mengungkapkan total perkebunan sawit yang tidak produktif mencapai 8.682,5 hektare. Ribuan hektare tanaman sawit tersebut tidak produktif karena berusia diatas 25 tahun serta tidak berbuah karena bibit yang ditanam tidak bagus atau kurang bermutu. Pihaknya sudah mengusulkan untuk peremajaan kebun sawit yang dibiayai Pemerintah Pusat. Sejak tahun 2019, tanaman kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara yang sudah diremajakan mencapai 3.080 hektare serta yang belum akan diusulkan secara bertahap. Selain tanaman sawit berusia diatas 25 tahun, program replanting juga dilakukan untuk tanaman yang produktivitasnya kurang dari 10 ton per hektare dalam setahun. Selain program replanting, petani juga mendapatkan bantuan sarana dan prasarana serta bantuan untuk anak-anak petani dalam kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh sebagai Organisasi Pemerintahan di Daerah Aceh telah berdiri dan terbentuk sejak sebelum tahun 1935 yang lalu pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia dan terus berlanjut kemasa Pemerintahan Penduduk Jepang (1942- 1945) dan hingga sampai saat sekarang ini. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh memiliki 6 (Enam) bidang dan 4 (Empat) UPTD yang salah satunya UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP. Tugasnya yaitu melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan. Berkaitan dengan permasalahan benih diatas, Pihak UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan Distanbun Aceh memiliki kewenangan dalam mengawasi atau menangani supaya perkebunan kelapa sawit di Aceh memenuhi persyaratan dan tidak merugikan petani mandiri atas masalah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang belum memahami penggunaan benih yang bersertifikasi. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul proposal “Efektivitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Perkebunan pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana selalu mengedepankan wawancara, observasi di lapangan yang ada kaitannya dengan Kinerja, Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh dalam rangka meningkatkan Produktivitas Perkebunan. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif

kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Dalam meningkatkan produktivitas perkebunan maka sangat diperlukan kinerja yang terencana dan telah belajar dari pengalaman sebelumnya. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh merupakan sub sektor tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan khususnya tanaman pangan Provinsi Aceh sehingga apabila salah dalam mengatur perencanaan maka sangat berdampak pada pertanian dan perkebunan secara keseluruhan. Untuk mengetahui Kinerja UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh dalam rangka meningkatkan Produktivitas Perkebunan, maka peneliti melakukan tahapan wawancara secara terbuka terhadap masyarakat petani dan pekebun tentang kinerja dalam hal peningkatan produktivitas perkebunan dan dapat dijabarkan sebagai berikut : “Para petani dan pekebun menyampaikan bahwa kinerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP masih tergolong cukup baik namun dalam sudut pandangan mereka, kinerja Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP harus meningkat dari sebelumnya sehingga dapat dirasakan oleh kaum petani dan pekebun”.

Dukungan anggaran Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh setiap tahunnya mendapat dukungan anggaran operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Dana ini dibagi setiap bidang dan UPTD yang diperuntukan untuk kegiatan operasional dan belanja alat. Untuk penggunaan anggaran terealisasi dengan baik dan memiliki dipertanggungjawabkan keuangan.

Pertama, Peneliti melakukan penelitian terhadap Bapak Habiburrahman, S.TP., M.Sc (Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan) tentang dukungan anggaran dalam peningkatan produktivitas perkebunan, Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Bapak Anwar, S.TP (Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP) tentang dukungan anggaran peningkatan produktivitas, Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Muhammad, S.P (Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan) tentang dukungan anggaran dalam peningkatan produktivitas perkebunan.

Dari ketiga sumber diatas dapat diterangkan bahwa Bapak Habiburrahman, S.TP., M.Sc (Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan) dan Bapak Anwar, S.TP (Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP) menyampaikan sama pendapatnya tentang peningkatan produktivitas perkebunan dengan memprioritaskan kegiatan yang bersifat operasional seperti pengawasan langsung lapangan sebagai tugas pokok dan pengecekan langsung benih tanaman pangan hortikultura perkebunan terhadap petani dan pekebun. Sedangkan Bapak Muhammad, S.P (Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan) menyampaikan pendapatnya sedikit berbeda namun tujuannya sama yaitu dengan menyampaikan beberapa persoalan dan permasalahan tentang perkebunan sehingga cocok dilakukan atensi dukungan anggaran agar rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar.

Sumber Daya Manusia Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Dalam meningkatkan produktivitas maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Disamping itu, memiliki pengaruh dari peningkatan produktivitas yakni dapat membawa kearah yang lebih baik jika dalam peningkatan tersebut berjalan dengan baik namun jika dalam peningkatan kapasitas tidak memperoleh hasil yang baik maka pengaruh didapat tidak baik pula. Berkenaan dengan itu juga, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP telah melakukan langkah-langkah pengawasan dan sertifikasi benih TPHP dalam peningkatan produktivitas perkebunan.

Untuk itu, Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Asraruddin (Kasubbag Tata Usaha

Efektivitas Pengawasan Dan Sertifikasi Benih TPHP Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Perkebunan Pada UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih TPHP Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP) tentang sumber daya manusia dalam peningkatan produktivitas perkebunan, Berikutnya peneliti juga melakukan penelitian terhadap Bapak Anwar, S.P (Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP) tentang sumber daya manusia dalam peningkatan produktivitas perkebunan, kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Muhammad, S.H (Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan) tentang sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas perkebunan.

Hasil wawancara terhadap 3 (tiga) orang responden atau pejabat UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP diatas, Dapat disimpulkan bahwa Bapak Anwar, S.P (Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP) dan Bapak Muhammad, S.H (Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan) menyampaikan hal yang sama tentang sumber daya manusia dalam peningkatan produktivitas perkebunan yaitu saat ini sumber daya manusia di UPTDBalai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP sudah bekerja maksimal mengawasi dan mendatangi para petani atau pekebun untuk mendatakan tanaman pangan dan diberikan pemahaman terhadap petani sehingga hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas perkebunan. Menurut sistem yang ada, Tugas dan tanggungjawab yang dilakukan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun apabila adanya pihak masih menilai adanya kekurangan bahkan belum sesuai dengan aturan yang ada maka dapat menjadi instroeksi diri untuk bahan evaluasi kedepan guna meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga dapat mempengaruhi anggota UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP untuk dapat lebih optimal dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kinerja UPTDBalai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh dalam meningkatkan produktivitas perkebunan menggunakan SOP atau regulasi yang ada dan ditambah dengan penjabaran petugas dilapangan seperti tahap awal mencari informasi darisemua kalangan pekebun tentang peredaran benih tanpa sertifikasi, pekebun yang mengelola lahan tanpa izin untuk dijadikan perkebunan, mencari agen-agen illegal yang menjual benih murah tanpasertifikasi serta memberikan perlindungan terhadap pekebun yang telah menanam sesuai dengan ketentuan perkebunan.
2. Distanbun Aceh jugamelakukan pengecekan tanaman mulai dari penanaman benih, pemeliharaan tanaman, pemupukan dan pengambilan hasil tanaman.
3. Distanbun Aceh juga melakukan mengecektanaman mulai dari penanaman benih, pemeliharaan tanaman, pemupukan dan pengambilan hasil tanaman sebelum masuk tahun berjalan dan rencana kegiatan juga disusun bersamaan dengan membedakan kegiatan yang bersifat ungensi dan kegiatan rutin tahunan serta pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Sehingga dengan dukungan anggaran yang memenuhi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh telah melaksanakan tugasnya dengan optimal.
4. Mengenai Sumber Daya Manusia UPTD BalaiPengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Distanbun Aceh sudah sesuai tergolong baik dan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal serta anggota yang ditempatkan disitu dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara. (2006). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Refika
- Aditama Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Tindakan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chalimah, et all. (2021). Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) Pekalongan.<http://Repository.Unikal.Ac.Id/127/3><http://repository.unikal.ac.id/id/ep rint/127>
- Edwards dan Hulme. (1996). Pendidikan Profetik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Hamza Andi. (2008). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika. h, 49
- Hasibuan, M. (2003). Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hubeis Mangkuprawira.S (2007). Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia. GHALIA INDONESIA. Bogor.
- Hersey, Paul, Blanchard, Kenneth H.(1993). Management for organizational behavior, sixth edition. Singapore : Prentice hall.
- Indrawijaya dan Pranoto. (2011). Revitalisasi Administrasi. Pembangunan. Bandung:Alfabeta
- Kelana, Momo. 2007. Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Kondalkar. (2009). Organizational Behavior.Boston: MA, Harvard Institute for International
- Kusdi. (2009). Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Manullang, M. (2012). Dasar-dasar Manajemen. Cetakan Kedua puluh dua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Milen, Anelli. (2006). Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Nawawi, H. Hadari. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Cetakan ke-7. Gadjah MadaUniversity Press. Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid dkk. (2008). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robbins, P. Stephen. (2006). Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta.
- R. Sutyo Bakir. (2009). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: KarismaPublishing Group, hlm.348